



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban KM.42
Email : kominfo@bintankab.go.id

Bandar Seri Bentan, 09 September 2024

Nomor : B/9/490/IX/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Rapat

Yth. (Daftar Terlampir)
di Tempat

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan, dengan ini mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 10 September 2024
Waktu : 09.00 Wib s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat 3 Kantor Bupati Bintan
Acara : Rapat Evaluasi Tahunan PPID dan Rapat
Pembahasan Isian Kuisisioner Monitoring dan
Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bintan



RUSLI, S.T.
Pembina Tk. I
NIP. 197803062006041011

Lampiran I Surat Plt. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Bintan
tentang Undangan Rapat

Nomor : B/9/490/IX/2024

Tanggal : 9 September 2024

DAFTAR UNDANGAN

1.	Kasubag Umum Inspektorat Daerah
2.	Kasubag Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.	Kasubag Umum Badan Pendapatan Daerah
4.	Kasubag Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.	Kasubag Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	Kasubag Umum Sekretariat Daerah
7.	Kasubag Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8.	Kasubag Umum Dinas Kesehatan
9.	Kasubag Umum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
10.	Kasubag Umum Dinas Pendidikan
11.	Kasubag Umum Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
12.	Kasubag Umum Dinas Sosial
13.	Kasubag Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14.	Kasubag Umum Dinas Komunikasi dan Informatika
15.	Kasubag Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16.	Kasubag Umum Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
17.	Kasubag Umum Dinas Lingkungan Hidup
18.	Kasubag Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
19.	Kasubag Umum Dinas Tenaga Kerja
20.	Kasubag Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
21.	Kasubag Umum Dinas Perhubungan
22.	Kasubag Umum Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
23.	Kasubag Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
24.	Kasubag Umum Satuan Polisi Pamong Praja
25.	Kasubag Umum Dinas Perikanan
26.	Kasubag Umum Dinas Pemuda dan Olahraga
27.	Kasubag Umum Dinas Perpustakaan dan Arsip
28.	Kasubag Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
29.	Kasubag Umum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
30.	Kasubag Umum Kecamatan Gunung Kijang
31.	Kasubag Umum Kecamatan Bintan Timur
32.	Kasubag Umum Kecamatan Bintan Utara
33.	Kasubag Umum Kecamatan Teluk Bintan
34.	Kasubag Umum Kecamatan Tambelan
35.	Kasubag Umum Kecamatan Teluk Sebong
36.	Kasubag Umum Kecamatan Toapaya
37.	Kasubag Umum Kecamatan Mantang
38.	Kasubag Umum Kecamatan Bintan Pesisir
39.	Kasubag Umum Kecamatan Seri Kuala Lobam
40.	Kasubag Umum Sekretariat DPRD
41.	Kasubag Umum Sekretariat Daerah

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bintan



RUSLI, S.T.
Pembina Tk. I
NIP. 197803062006041011

FOTO KEGIATAN RAPAT TAHUNAN PPID UTAMA BERSAMA PPID PELAKSANA KAB.BINTAN





PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban KM.42
Email : kominfo@bintankab.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa, 10 September 2024

Tempat : Ruang Rapat 3 Kantor Bupati Bintan

Kegiatan : Rapat Pembahasan Isian Kuisioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Arifin Zulhan	Pelatih Olahraga Muda 1	
2	Ririn Ayu Iestari	Kasumpeg BKAD	2
3	Ikhshan	Staf	3
4	Storipah Zubaidah	Kasubagurup 2 Keuangan Inspekturat	4
5	Desi Martarui	Kasumpeg DAPP	5
6	Fersi	Staf DAPP	6
7	Yuliel -a	Kasumpeg BUKI	7
8	Dian	Staf BUKI	8
9	Rio Arghanta	Kasumpeg BINSIT	9
10	Firman A	Banker	10
11	ZULCHAKI-A	WVU MINTANG	11
12	Komar Aniluddin	Kasubag Perkiwil	12
13	ERI SUKISTYAWO	Kasubag DPAD	13
14	Anisat	Kasubag sdt	14
15	WIND. DEWATTJUM	Kesbang	15
16	Wah ARIFUZZAL	Kasum BPSK	16
17	SALVIA	Kasum Dapeltab	17
18	Bondan L	Kasubag Umum dndd	18
19	M. Nur APOHACI.	Kasubag Umum DITK	19
20	Damiliwati -	Kasubag Umum DITK	20
21	AGUSTINUS . H	STAF UMUM SPPK	21

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
22	Rana	ATAKATIS		22
23	Prambudi	Karubag Um	23	
24	Ryahrival	STAF UMUM ANP		24
25	Zoh A.F	STAFF PIP	25	
26	Hendri Sukawan	Kasumpey NPIP		26
27	Haimun	Kereng DAPAD	27	
28	CERAH RIADI	KASUMPES BAPANDA		28
29	MASYITHAH	KASUBRAB UMUM TAPAYA	29	
30	Suwesh D	Staf UMUM TAPAYA		30
31	Teddy A	Kasubag DPLPP	31	
32	IKA PUTRI Y	STAF PIP		32
33	Hendri	staf Umum DLH	33	
34	Maulana	umum DLH		34
35	S. Rini	Desinter	35	
36	Sy. Maranty	Kasum Disbudpar		36
37	TMO		37	
38	Nerang Hamidah	Kasum Dinsos		38
39	Mardiana	Keseluruhan Bunt	39	
40	Nur Ineah	Kr. umpeg Sebong		40
41	Fazri Faisal	KR. Solobog um	41	
42	Ramlah	Staf		42
43	Inka Kurnia	Cak DP3 KB.	43	
44	Olra N	Staf		44
45	Roni	"	45	
46	Salih	Kubid PIP		46
47	Charles	Pranata Humas	47	
48	Mayzaraty	JF Mub. most ahli MUBU		48

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN		
49	AULIA RACHMAYANTI	STAF	49	Cud	
50	Supriyanti . F	Saharman Ahli Madya		50	S.F.

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

KUALITAS INFORMASI

(Mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian/up to date yang tersedia di website Pemerintah Kabupaten/Kota)

NO	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN	NILAI
		Ya	Tidak		
I	INFORMASI WAJIB BERKALA <i>Informasi Terkait Fungsi Utama Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				
A	Informasi tentang profil Pemerintah Kabupaten/Kota				
1	Sebutkan disertai link website deskripsi tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota				
2	Mengumumkan informasi LHKPN Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (bukan dalam bentuk link KPK) yang terdiri dari:			BKPSDM	
	- Bupati/Walikota				
	- Wakil Bupati/Walikota				
	- Sekretaris Daerah				
	- Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota				
3	Mengumumkan informasi jumlah dan prosentase yang wajib LHKSN dalam lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota yang diumumkan dalam website (bukan website KPK)			INSPEKTORAT	
B	Informasi tentang program dan/atau kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat strategis sesuai tugas dan fungsi				

1	Mengumumkan program-program atau kegiatan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten/Kota yang diumumkan di website sesuai dengan tugas dan fungsi yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran.			BAPELITBANG	
2	Mengumumkan program-program atau kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Tahun 2024 yang diumumkan dalam website yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan			BAPELITBANG	
3	Mengumumkan program-program atau kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan Tahun 2023 yang diumumkan dalam website yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan			BAPELITBANG	
C	Informasi Keuangan				
1	Laporan Keuangan			www.bintankab.go.id/ipkd	
a	Mengumumkan dalam website Pemerintah Kabupaten/Kota informasi Laporan Keuangan Tahun 2023 yang telah diaudit yang terdiri dari:			www.bintankab.go.id/ipkd	
	- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)			www.bintankab.go.id/ipkd	
	- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)			www.bintankab.go.id/ipkd	
	- Daftar Aset dan Investasi			www.bintankab.go.id/ipkd	
	- Neraca			www.bintankab.go.id/ipkd	
b	Perda APBD beserta lampiran APBD dan perubahannya (bilamana sudah ada perubahan)			www.bintankab.go.id/ipkd	
c	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LKPD)			www.bintankab.go.id/ipkd	
d	Opini BPK RI atas LKPD			www.bintankab.go.id/ipkd	
2	Informasi Keuangan Lainnya				
a	Kebijakan Anggaran Umum (KUA) 2024			BKAD	
b	Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2024			BKAD	
c	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) 2024			BKAD	
d	Ringkasan RKA SKPD 2024			BKAD	
e	Ringkasan DPA SKPD 2024			BKAD	
f	Ringkasan RKA PPKD 2024			BKAD	
g	Ringkasan DPA PPKD 2024			BKAD	

h	Mengumumkan dalam website Pemerintah Kabupaten/Kota informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan Tahun 2024			bintankab.go.id	
D	Pengadaan Baranng dan Jasa				
1	Mengumumkan informasi rencana umum pengadaan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam SIRUP .			SIRUP	
2	Sebutkan pengumuman paket-paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2024 berkaitan program atau kegiatan infrastruktur dan non infrastruktur dengan nilai tertinggi atau strategis sebagaimana tercantum dalam LPSE yang telah selesai serah terima			www.lpse.bintankab.go.id	sudah
a	Paket 1			www.lpse.bintankab.go.id	sudah
b	Paket 2			www.lpse.bintankab.go.id	sudah
c	Paket 3			www.lpse.bintankab.go.id	sudah
d	Paket 4			www.lpse.bintankab.go.id	sudah
e	Paket 5			www.lpse.bintankab.go.id	sudah
3	Sebutkan pengumuman paket-paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2024 berkaitan program kegiatan infrastruktur dan non infrastruktur dengan nilai tertinggi atau strategis sebagaimana dalam LPSE yang masih berjalan dan belum serah terima				
a	Paket 1			www.lpse.bintankab.go.id	sudah
b	Paket 2			www.lpse.bintankab.go.id	sudah
c	Paket 3			www.lpse.bintankab.go.id	sudah
d	Paket 4			www.lpse.bintankab.go.id	sudah
e	Paket 5			www.lpse.bintankab.go.id	sudah
II	DAFTAR INFORMASI PUBLIK <i>Informasi Terkait DIP Sesuai Fungsi Utama Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				
1	Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan dan mengumumkan dan menetapkan informasi yang dikuasai Tahun 2024 dalam Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai standar Perki 1 Tahun 2021			ppid.bintankab.go.id	
2	Pemerintah Kabupaten/Kota telah mencantumkan informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka			ppid.bintankab.go.id	
3	Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa			ppid.bintankab.go.id	

III	INFORMASI DIKECUALIKAN <i>Informaasi Dikecualikan sesuai fungsi utama Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				
1	Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan dan mengumumkan Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi sesuai standar Perki 1 Tahun 2021			ppid.bintankab.go.id	

TOTAL NILAI	0
--------------------	----------

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

JENIS INFORMASI

(Informasi Terbuka Berdasarkan Pasal 13 Perki 1 Tahun 2021)

NO	PERTANYAAN	KETERSEDIAAN		BUKTI PELAKSANAAN	NILAI
		Ya	Tidak		
A	INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT <i>Menyediakan dokumen Dokumen Informasi Tersedia Setiap Saat</i>				
1	Menyediakan Dokumen informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala Tahun 2023/24 terkait program dan kegiatan meliputi:				
a	Dokumen program-program atau kegiatan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran.			BAPELITBANG	
b	Dokumen program-program atau kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Tahun 2024 yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan			BAPELITBANG	
c	Dokumen program-program atau kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan Tahun 2023 yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan			SUDAH	
d	Dokumen laporan keuangan hasil audit Tahun 2023 lengkap terdiri dari CALK, LRA, Neraca dan Daftar Aset dan Investasi			SUDAH	
e	Dokumen keuangan tahun 2024 dalam bentuk DIPA dan RKA-KL Tahun 2024			BKAD	
f	Menyediakan dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan dan telah serah terima pekerjaan Tahun 2024 meliputi:				

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK);			DISPERKIM	
2	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;			DISPERKIM	
3	Spesifikasi Teknis;			DISPERKIM	
4	Rancangan Kontrak;			DISPERKIM	
5	Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;			DISPERKIM	
6	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;			DISPERKIM	
7	Daftar Kuantitas dan Harga;			DISPERKIM	
8	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;			DISPERKIM	
9	Gambar Rancangan Pekerjaan;			DISPERKIM	
10	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;			DISPERKIM	
11	Dokumen Penawaran Administratif;			DISPERKIM	
12	Surat Penawaran Penyedia;			DISPERKIM	
13	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;			DISPERKIM	
14	Berita Acara Pemberian Penjelasan;			DISPERKIM	
15	Berita Acara Pengumuman Negosiasi;			DISPERKIM	
16	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;			DISPERKIM	
17	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;			DISPERKIM	
18	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;			DISPERKIM	
19	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);			DISPERKIM	
20	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan ;			DISPERKIM	
21	Surat Perintah Mulai Kerja;			DISPERKIM	
22	Surat Jaminan Pelaksanaan;			DISPERKIM	
23	Surat Jaminan Uang Muka;			DISPERKIM	
24	Surat Jaminan Pemeliharaan;			DISPERKIM	

25	Surat Tagihan;			DISPERKIM	
26	Surat Pesanan E-purchasing;			DISPERKIM	
27	Surat Perintah Membayar;			DISPERKIM	
28	Surat Perintah Pencairan Dana;			DISPERKIM	
29	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;			DISPERKIM	
30	Laporan Penyelesaian Pekerjaan;			DISPERKIM	
31	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;			DISPERKIM	
32	Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;			DISPERKIM	
33	Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over			DISPERKIM	
	Catatan : PPID hanya mencantumkan informasi/dokumen yang relevan sesuai dengan jenis pengadaan barang dan jasa. Misalnya, sebuah pengadaan barang dan jasa tidak dilaksanakan secara e-purchasing maka PPID menjawab TIDAK DIPERSYARATKAN pada "Kolom Bukti Pelaksanaan"				
2	Menyediakan dokumen Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;				
a	Daftar Memorandum of Understanding (MoU) sesuai tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota atau bentuk lainnya Tahun 2024			OPD dan KECAMATAN	
b	Surat Perjanjian Kemitraan 2024			OPD dan KECAMATAN	
c	Surat Perjanjian Swakelola 2024			OPD dan KECAMATAN	
d	Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola 2024			OPD dan KECAMATAN	
e	Daftar Dokumen Kontrak Tahun 2022 - 2023			LPSE	
3	Menyediakan dokumen Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya 2024;			SEKRETARIAT DAERAH	
4	Menyediakan dokumen Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan 2024			DPMPSTP	Sudah
5	Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2024;			BKPSDM	

6	Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2024;			SP4N LAPOR	
7	Menyediakan dokumen Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya 2024;			SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUKUM SEKDA)	
8	Menyediakan dokumen Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum 2024;			ppid.bintankab.go.id	
B	INFORMASI TERBUKA LAINNYA <i>Menyediakan dan Mengumumkan Informasi Wajib Berkala</i>				
1	Mengumumkan Ringkasan laporan akses Informasi Publik dan menyediakan dokumen Tahun 2023;				
a	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;			ppid.bintankab.go.id	
b	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik			ppid.bintankab.go.id	
c	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak;			ppid.bintankab.go.id	
d	Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.			ppid.bintankab.go.id	
2	Mengumumkan Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pemerintah Kabupaten/Kota			BPBD	sudah

TOTAL NILAI

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

PELAYANAN INFORMASI

NO	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN	NILAI
		Ya	Tidak		
I	PROSEDUR <i>Mekanisme Pelayanan Informasi</i>				
A	Menyediakan dan mengumumkan Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;				
1	Tata cara memperoleh Informasi Publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan;			ppid.bintankab.go.id	
2	Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi			SP4NLapor	
B	Menyediakan dan mengumumkan Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;				
1	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Pemerintah			SP4NLapor	
2	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.			DPMPTSP	sudah
II	PEMAHAMAN SUBSTANSI <i>Ketepatan Pelayanan Substansi Permohonan Informasi</i>				
1	Menyediakan buku atau daftar register permohonan informasi publik yang sekurang-kurangnya memuat nama pemohon, alamat pemohon, informasi yang diminta, dan alasan penolakan bilamana permohonan informasi ditolak			ppid.bintankab.go.id	
2	Menyediakan dokumen jawaban PPID atas penolakan permohonan informasi			ppid.bintankab.go.id	
3	Menyediakan dokumen jawaban PPID terhadap permohonan informasi yang diterima			ppid.bintankab.go.id	
4	Menyediakan dokumen serah terima pemberian informasi hasil kesepakatan mediasi			ppid.bintankab.go.id	
5	Menyediakan dokumen pemberitahuan kepada pemohon informasi disertai alasan dalam hal PPID membutuhkan waktu perpanjangan pemberian informasi			ppid.bintankab.go.id	
III	PENANGANAN KOMPLAIN <i>Mekanisme Komplain</i>				
1	Menyediakan dan mengumumkan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan			ppid.bintankab.go.id	
2	Menyediakan dan mengumumkan standar penanganan pengajuan keberatan di internal Pemerintah Kabupaten/Kota			ppid.bintankab.go.id	

TOTAL NILAI

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

KOMITMEN ORGANISASI

(Berkaitan dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi anggaran, SDM, regulasi dan tupoksi)

NO	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN	NILAI
		Ya	Tidak		
A PROFIL PPID					
1	Menyediakan dan mengumumkan informasi profil PPID yang meliputi Struktur, Visi dan Misi, dan SK Penetapan			ppid.bintankab.go.id	
2	Menyediakan dan mengumumkan tugas dan fungsi PPID			ppid.bintankab.go.id	
3	Menyediakan dan mengumumkan standar pelayanan informasi publik yang terdiri dari:			ppid.bintankab.go.id	
a	SOP Permohonan Informasi			ppid.bintankab.go.id	
b	SOP Uji Konsekuensi			ppid.bintankab.go.id	
c	SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik			ppid.bintankab.go.id	
d	SOP Pendokumentasian informasi publik			ppid.bintankab.go.id	
4	Maklumat Pelayanan			ppid.bintankab.go.id	
B TUGAS DAN KEWENANGAN ATASAN PPID					
Peran Pimpinan					
1	Menetapkan kebijakan pelayanan informasi publik			ppid.bintankab.go.id	
2	Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.			ppid.bintankab.go.id	
3	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana			ppid.bintankab.go.id	
C PELAKSANA TUGAS PPID					
Institusionalisasi PPID					
1	Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik			ppid.bintankab.go.id	
2	Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Pemerintah Kab/Kota			ppid.bintankab.go.id	
3	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi			ppid.bintankab.go.id	
D ANGGARAN PPID					
1	Menyediakan anggaran rutin kegiatan keterbukaan informasi			ppid.bintankab.go.id	
2	Menyediakan anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID			ppid.bintankab.go.id	
3	Menyediakan anggaran lain bagi kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi			ppid.bintankab.go.id	

TOTAL NILAI

0

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

SARANA PRASARANA

(Penyediaan fasilitas dalam rangka mendukung pelayanan informasi publik)

No	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN	NILAI
		Ya	Tidak		
A	ELEKTRONIK				
	Menu PPID yang terintegrasi dengan website utama yang menyediakan informasi:				
1	Informasi Wajib Berkala			ppid.bintankab.go.id	
2	Informasi Tersedia Setiap Saat			ppid.bintankab.go.id	
3	Informasi Serta Merta			ppid.bintankab.go.id	
4	Informasi Dikecualikan			ppid.bintankab.go.id	
5	Daftar Informasi Publik			ppid.bintankab.go.id	
6	Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)			ppid.bintankab.go.id	
7	Pengajuan keberatan online (bukan mengunduh formulir pengajuan keberatan)			ppid.bintankab.go.id	
8	Seluruh website SKPD/PPID Pelaksana terintegrasi dengan website utama. Sebutkan beberapa diantaranya;			bintankab.go.id	
a	Sebutkan Link Website			bintankab.go.id	
b	Sebutkan Link Website			bintankab.go.id	
c	Sebutkan Link Website			bintankab.go.id	
d	Sebutkan Link Website			bintankab.go.id	
e	Sebutkan Link Website			bintankab.go.id	
9	Seluruh website SKPD/PPID Pelaksana menyediakan informasi:			OPD dan Kecamatan	
a	Informasi Wajib Berkala			OPD dan Kecamatan	
b	Informasi Tersedia Setiap Saat			OPD dan Kecamatan	
c	Informasi Serta Merta			OPD dan Kecamatan	
d	Informasi Dikecualikan			OPD dan Kecamatan	
e	Daftar Informasi Publik			OPD dan Kecamatan	
f	Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)			OPD dan Kecamatan	

g	Pengajuan keberatan online (bukan mengunduh formulir pengajuan keberatan)			OPD dan Kecamatan	
10	Menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi publik/papan informasi elektronik/lainnya			OPD dan Kecamatan	
11	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki aplikasi yang memuat layanan keterbukaan informasi/PPID berbasis mobile (android/linux/IOS) yang dapat diakses untuk umum			DISKOMINFO	
B	NON ELEKTRONIK				
	Meja Layanan Informasi				
1	Ruang Khusus Layanan Informasi/PPID disertai Meja Layanan			OPD dan Kecamatan	
2	Formulir Permohonan Informasi			DISKOMINFO	
3	Formulir Keberatan			DISKOMINFO	
4	Jadwal pelayanan informasi publik			DISKOMINFO	
5	Layanan Pendukung Lainnya			DISKOMINFO	
C	LAYANAN DIFABEL				
	Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas				
1	Aksesibilitas Tuna Rungu dan Wicara			OPD dan Kecamatan	
2	Aksesibilitas Tuna Netra			OPD dan Kecamatan	
3	Aksesibilitas penyandang disabilitas Lainnya			OPD dan Kecamatan	

TOTAL NILAI

0

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

DIGITALISASI

(Proses Penggunaan teknologi informasi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksestabilitas, dan kualitas layanan)

No	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN	NILAI
		Ya	Tidak		
A	MEDIA SOSIAL Akun media sosial (facebook, instagram, twitter) yang aktif mengumumkan informasi publik sebagai berikut:				
1	Mengumumkan Informasi berkaitan ruang lingkup, tugas dan fungsi Badan Publik			OPD dan Kecamatan	
2	Mengumumkan Informasi berkaitan program dan kegiatan strategis sesuai ruang lingkup, tugas dan fungsi Badan			OPD dan Kecamatan	
3	Mengumumkan Informasi berkaitan penggunaan atau realisasi anggaran Tahun 2024			OPD dan Kecamatan	
4	Mengumumkan informasi DIPA atau RKA K/L Tahun Anggaran 2024			OPD dan Kecamatan	
5	Mengumumkan Informasi berkaitan tata cara pengajuan permohonan informasi			OPD dan Kecamatan	
6	Mengumumkan Informasi berkaitan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan			OPD dan Kecamatan	
B	PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Pengembangan Layanan Publik				
1	Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan aplikasi - aplikasi layanan publik			DISKOMINFO	
2	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki aplikasi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas			DISKOMINFO	
3	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki aplikasi untuk berkaitan bantuan sosial			DISKOMINFO	
C	IMPLEMENTASI SATU DATA				
1	Membentuk Forum Data Provinsi yang terdiri dari Pembina Data Provinsi, Walidata Provinsi, Walidata Pendukung, Walidata Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah kabupaten/kota			DISKOMINFO	
2	Walidata Menyebarkan Data ke Portal Satu Data Indonesia			DISKOMINFO	

TOTAL NILAI

NAMA ADMIN / PPID PELAKSANA :

No. HP :

NAMA OPD / KECAMATAN :